

**PEMIKIRAN POLITIK K. H. ZAINUDDIN M. Z DALAM PERSEPEKTIF
SIYASAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
BAHRUL ULUM
NIM: 0970080

**PEMBIMBING:
DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI.**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

**PEMIKIRAN POLITIK KH. ZAINUDDIN MZ DALAM PERSEPEKTIF
SIYASAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
BAHRUL ULUM
NIM: 0970080

**PEMBIMBING:
DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI.**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Setelah Era Reformasi bergulir tidak sedikit kiai yang tadinya hidup bertapa, khusyuk, damai, dan tenram dalam Pondok Pesantren menjadi sebuah haluan, menyebrangi dunia baru yang bernama politik praktis. Salah satunya adalah KH. Zainuddin MZ yang merupakan salah satu tokoh *da'i* kharismatik dan juga aktif dalam dunia politik. Beliau dua kali masuk partai politik yang berbeda yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum akhirnya bersama rekan rekannya mendirikan Partai Persatuan Pembangunan Reformasi (PPP Reformasi) pada tanggal 20 Januari 2002 yang kemudian berubah nama menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR). Beliau juga sempat menjadi ketua umum yang kemudian dicalonkan untuk menjadi presiden pada pemilu tahun 2004.

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pandangan siyarah terhadap pemikiran KH. Zainuddin MZ tentang politik dan dakwah, kriteria pemimpin Partai Persatuan Pembangunan, dan golput?

Penelitian tentang pemikiran politik KH. Zainuddin MZ, penyusun menggunakan jenis penelitian studi perpustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan pada penelusuran dan penelaahan pada bahan tertulis. Dalam penelitian ini juga terdapat dua sumber data: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah buku atau literatur yang menjadi rujukan utama dan dalam penelitian ini dan sumber data sekunder adalah karya-karya sarjana yang membahas tentang pemikiran politik praktis KH. Zainuddin MZ baik yang berupa buku, artikel, dan lain sebagainya. Ada pun metode analisa adalah induktif, yaitu analisa yang berangkat dari fakta-fakta khusus, pristiwa-pristiwa kongkrit, kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum. Sedang untuk pendekatan masalah adalah pendekatan historis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan menelusuri sisi-sisi historis sebuah obyek penelitian mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan sebuah pemikiran serta konteks sosial politik yang memunculkan karakteristik dominan dari tokoh yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa KH. Zainuddin MZ sebagai seorang pedakwah ketika ada pemilu beliau lebih mementingkan umat daripada kepentingan kelompok tertentu karena umat Islam tidak hanya berada di kelompok tertentu tapi ada di mana-mana. KH. Zainuddin MZ selama aktif di PPP mempunyai kriteria dalam menentukan pemimpin partai tersebut. Pertama, ia komitmen keislamannya harus kokoh. Kedua, wawasan kebangsaannya harus luas. Ketiga, ia harus populis. KH. Zainuddin MZ sendiri berpendapat mengenai golput (golongan putih), menurut beliau adalah hak asasi yang harus dihormati namun, tidak boleh mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoteksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bahrul Ulum
NIM : 0970080
Judul Skripsi : **Politik Praktis KH. Zainuddin MZ Persepektif Siyasah**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2013

Pembimbing


Drs. M. Kizai Oosim, M.Si
NIP: 19630131 1992031 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DHS/PP.00.9/207.b/2013

Skripsi/Tugas Akhir yang Berjudul : “Pemikiran Politik KH. Zainuddin MZ
Dalam Persepektif Siyasah”

Yang dipersiapkan dan disusun Oleh:

Nama : Bahrul Ulum
NIM : 0970080
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 03 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Jinayah
Siyasah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

SIDANG DEWAN MUNAQOSAH :

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim., M. Si

NIP: 19630131 199203 1 004

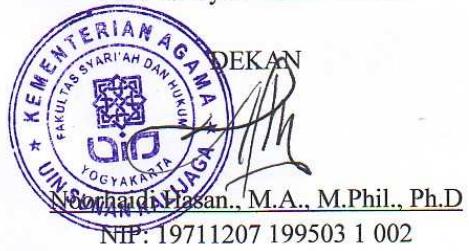
Pengaji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19731105 199603 1002

Pengaji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 03 Juni 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah dan Hukum



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahrl Ulum

NIM : 09370080

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya
atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 05 Mei 2013

Yang menyatakan



BAHRUL ULUM
NIM: 09370080

MOTTO

“Istiqomah dan bersabar tuk raih
khusnul khotimah”



PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasihku kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam pengusungan skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

mama dan papaku tercinta yang sekaligus menjadi guru pertamaku di dunia ini, engkau rela meneteskan keringat dan air mata untuk hari-hariku .

Kedua Adékku dan Istriku tercinta yang selalu setia sabar menyemangati dan mendampingi dalam setiap langkahku.

Pengasuh dan Teman-temanku di Komplek Asy-Syathibi dan Teman-teman JS angkatan 2009 terimakasih atas segalanya.

*Almamaterku Komplek Asy-Syathibi
dan UIN Sunan Kalijaga*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ʈ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَّة	ditulis	Muta' addidah
	ditulis	‘iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

	ditulis	hikmah
--	---------	--------

حکمة جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
--------------	---------	---------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2. Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3. Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

--	--	--	--

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بِينَكُمْ	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

الْقُرْآن	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا رسول الله والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Politik Praktis KH. Zainuddin MZ Persepektif Siyasah”**. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Kamsi., M.A. selaku Penasehat Akademik.

4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim., M.Si., selaku pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda Sumadi dan Ibunda Sukatin terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang dan bimbingan semoga selalu menjadi anak yang berguna.
7. Istriku Lailazul Mabruroh serta adikku Binti Kholifatul Janah dan Umi Barokah serta kedua mertuaku bapak Miftah Arifin dan ibu Rumini terimakasih atas dukungan moril yang selama ini kalian berikan untukku.
8. Kawan-kawanku di kelas JS angkatan 2009, teman-teman di Madrasah Aliyah Ali Maksum, kawan-kawan Asy-Syathibi semua semoga tetap eksis, khusus buat Fikri, Irfangi, dan Kudrat tetap solid sampai tua ya, serta Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, tidak lupa juga teman-teman yang selalu ada di kala susah dan bahagiaku.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazākumullāh Khairā al-Jazā*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perubahan politik dan hukum Islam kedepan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Yogyakarta, 05 Mei 2013 M

Penyusun

Bahrul Ulum
09370080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II ISLAM DAN POLTIK PRAKTIS KIAI	21
A. Pengertian Islam, Politik, Dan Kiai.....	21
1. Pengertian Islam	21
2. Pengertian Politik	22
3. Pengertian Kiai.....	25
B. Konsep Politik Praktis	28
C. Peran politik Di Masyarakat	35
D. Kontribusi Kiai Dalam Bidang Politik	41
E. Islam dan politik Praktis	45
BAB III POLITIK PRAKTIS KH. ZAINUDDIN MZ	51
A. Biografi KH. Zainuddin MZ	51
B. Kiprah Politik Praktis KH. Zainuddin MZ Dalam Partai.....	56
1. Dalam Partai Persatuan Pembangunan	56
2. Dalam Partai Bintang Reformasi.....	58
C. Pemikiran Politik KH. Zainuddin MZ	62
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK PRAKTIS KH. ZAINUDDIN MZ PERSEPEKTIF SIYASAH	68
A. Sikap KH. Zainuddin MZ Dalam Memposisikan Diri Pada Dakwah Dan Kampanye.....	68
B. Pandangan KH. Zainuddin MZ Terhadap Pemilihan Pemimpin Dalam Partai Persatuan Pembangunan.....	72

C. Tanggapan KH. Zainuddin MZ Terhadap Golongan Putih (GOLPUT)	79
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Daftar Terjemah	I
II. Biografi Ulama/Tokoh.....	IV
III. Curriculum Vitae.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bukan rahasia lagi, setelah Reformasi bergulir tidak sedikit kiai yang tadinya hidup bertapa, khusyuk, damai, dan tenram dalam Pondok Pesantren menjadi sebuah haluan, menyebrangi dunia baru yang bernama politik praktis. Akibatnya, muncul kabar angin yang menyeruak ke ruang publik bahwa beberapa kiai telah menggunakan agama sebagai kendaraan untuk main-main dengan kekuasaan dan mengegarkan kepentingan dirinya. Tentu saja kabar yang tidak seluruhnya benar dan dibesar-besarkan tersebut sangat merugikan para kiai dan membuat prihatin umat Islam.¹

Di kalangan umat Islam, kiai adalah salah satu entitas elit yang mempunyai kedudukan terhormat, karena dianggap sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas, mendalam dan makhluk *linuwih*. Kiai juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi (*warāsat al-anbiyā*) sehingga kiai menjadi sumber legitimasi baik dalam domain agama maupun sosial politik.²

Bagi kiai yang terjun dalam politik praktis, moralitas mutlak diperlukan agar tidak mengedepankan kepentingan diri sendiri, golongan serta kepentingan politik sesaat dengan menghalalkan segala cara termasuk menjual dalil-dalil agama. Kiai tidak diperkenankan memakai jargon-jargon agama

¹ Ayu Sutarto, *Menjadi NU Menjadi Indonesia*, (Surabaya: Khalista, 2008), hlm. 1.

² Heri Kriswanto, *Gagalnya Peranan Politik Kiai Dalam Mengatasi Krisis Multi Dimensional*, (Yogyakarta : Pesantren Nawesae Press, 2008), hlm. 30.

untuk memobilisasi masa demi tujuan politik sesaatnya. Setelah menjadi politisi para kiai harus benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat yang selama ini tertindas oleh penguasa baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya serta memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam yang sangat luhur dan mulia.

Sebagai seorang pembimbing moral umat, kiai tidak boleh hanya bisa mengumandangkan dalil-dalil agama tanpa melaksanakannya dalam berperilaku dan bertindak, yang paling dikhawatirkan, apabila para kiai hanya menggunakan dalil agama untuk menghasut, memecah-belah, dan membodohi rakyat demi kepentingan politiknya.

Berkaitan dengan kata politik setidaknya dikenal dua istilah yaitu politik teoritis dan politik prakmatis. Dalam kamus ilmiah populer disebutkan bahwa teoritis mempunyai arti: berdasarkan teori, berbeda dengan pengetahuan langsung. Sementara teori adalah: 1.) dalil 2.) ajaran atau pemahaman (pandangan) tentang sesuatu berdasarkan kekuatan akal (ratio), 3.) patokan dasar atau garis-garis dasar sains dan ilmu pengetahuan, 4.) pedoman praktik.³ Dengan demikian politik teoritis adalah politik dengan berbagai definisinya dalam bentuk teori yang biasanya bersifat akademik dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Sedangkan praktis adalah: 1.) berdasarkan praktik, 2.) mudah dan menyenangkan, 3.) cocok, tepat karena pelaksanaannya mudah. Sementara praktik adalah cara melakukan apa yang disebut dalam teori dan pelaksanaan

³ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Poluler*, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 746.

teori. Dengan demikian politik praktis dapat diartikan sebagai politik dengan berbagai definisinya yang dilaksanakan di lapangan berdasarkan apa yang terdapat dalam teori. Dalam tulisan ini yang disebut dengan politik praktis adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam pemerintahan serta kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum yang dilaksanakan di lapangan atau kehidupan bernegara.

Salah satu kiai yang masuk dalam ranah politik praktis adalah KH. Zainuddin MZ, beliau adalah seorang da'i kondang di Indonesia. Ia memiliki nama lengkap KH. Zainuddin Muhammad Zein, ia lahir di Jakarta pada tanggal 2 Maret 1951. Anak tunggal buah cinta pasangan Turmudzi dan Zainabun ini dikenal dengan julukan "*da'i sejuta umat*" karena dakwahnya yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Suami Hj. Kholilah ini semakin dikenal masyarakat ketika ceramahnya mulai memasuki dunia rekaman. Kasetnya beredar bukan saja di seluruh pelosok nusantara, tetapi juga ke beberapa Negara Asia.

Kepiawaian ceramahnya sempat mengantarkan Zainuddin ke dunia politik. Pada tahun 1977-1982 ia bergabung dengan partai berlambang Ka'bah (Partai Persatuan Pembangunan). Jabatannya pun bertambah, selain da'i juga sebagai politikus. Sebelum masuk DPP, dia sudah menjadi pengurus aktif PPP, yakni menjadi anggota dewan penasihat DPW DKI Jakarta.

KH. Zainuddin MZ bersama rekan-rekannya mendeklarasikan Partai Persatuan Pembangunan Reformasi (PPP Reformasi) pada tanggal 20 Januari

2002 yang kemudian berubah nama menjadi Partai Bintang Reformasi dalam Muktamar Luar Biasa pada tanggal 8-9 April 2003 di Jakarta. Ia juga secara resmi ditetapkan sebagai calon presiden oleh partai ini. Zainuddin MZ menjabat sebagai Ketua Umum PBR sampai tahun 2006.⁴

Seiring kondisinya yang semakin lanjut usia, KH. Zainuddin MZ meninggal dunia hari Selasa tanggal 5 Juli 2011. Beliau meninggal dunia pada jam 10.15 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina, dikarenakan sakit gula darahnya kambuh, serta jantungnya juga kambuh. Hal ini dinyatakan oleh KH. Mahdi yang merupakan kerabat dekat almarhum, penyebab wafatnya da'i kondang ini adalah serangan jantung.⁵

Berdasarkan uraian di atas penyusun ingin mengetahui tentang apa yang menjadi alasan para kiai masuk dalam ranah politik praktis. Terutama pada KH. Zainuddin MZ yang masuk pada dunia politik praktis yang pada mulanya beliau menganggap bahwa politik itu kotor, politik itu penuh intrik dan tipu muslihat tapi pada akhirnya beliau ikut berpolitik, oleh karena itu penyusun mengambil judul **“Pemikiran Politik KH. Zainuddin MZ Dalam Persepektif Siyasah”**

⁴<http://th1979.wordpress.com/2010/09/09/biografi-kh-zainuddin-mz/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2012.

⁵ www.vivanews.com, diakses pada tanggal 5 Juli 2011.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok masalah yang akan dibahas dalam riset ini, adalah:

Bagaimana pandangan siyasah terhadap pemikiran KH. Zainuddin MZ tentang politik dan dakwah, kriteria pemimpin Partai Persatuan Pembangunan, dan golput?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam riset ini adalah:

Untuk menjelaskan pandangan siyasah terhadap pemikiran KH. Zainuddin MZ tentang politik dan dakwah, kriteria pemimpin Partai Persatuan Pembangunan, dan golput.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam riset ini adalah:

1. Sumbangan bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan Islam atau siapa saja yang tertarik dengan kajian politik praktis di kalangan kiai, khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah, mengenai peranan KH. Zainuddin MZ yang menjadi kiai sekaligus seorang politisi.
2. Peneliti akan memberikan informasi yang cukup signifikan tentang keterlibatan kiai dalam memajukan negara khususnya keterlibatan KH. Zainuddin MZ dalam politik praktis.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka perlu dilaksanakan oleh seseorang ketika membuat karya ilmiah atau skripsi untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi tersebut. Untuk penelitian yang fokus pada kajian politik praktis KH. Zainuddin MZ memang belum ada, namun terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga sebagai bahan pertimbangan dan penulis telah mengkaji dari berbagai penelitian tersebut, di antaranya adalah:

“Studi Humor Terhadap Ceramah KH. Zainuddin MZ” skripsi S. Rofiana Tri Agustina ini membahas tentang dakwah KH. Zainuddin MZ yang memiliki argumen yang kukuh, logis, dan secara langsung menyentuh masalah masyarakat yang juga tidak mengenyampingkan dengan humor baik masalah budaya, politik, atau masalah-masalah yang timbul dalam keseharian di masyarakat, sehingga menyebabkan beliau diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.⁶

Ibnu Hajar dalam bukunya yang berjudul *“Kiai Di Tengah Pusaran Politik”* dalam buku ini banyak membahas tentang keterlibatan kiai dalam politik praktis yang pada periode sebelumnya seorang kiai merupakan sosok ideal yang dihormati dan disegani, karena kiai adalah pemimpin kharismatik yang kata-katanya diikuti oleh penduduk muslim, namun masuknya kiai di

⁶ S. Rofiana Tri Agustina, *Studi Humor Terhadap Ceramah K. H Zainuddin M. Z, skripsi tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2004).

ranah politik menjadi sosok yang kadang-kadang dijelaskan oleh santri dan masyarakat.⁷

“Peran Politik Kiai Studi Pilkada 2006 di Kabupaten Tasikmalaya” skripsi Encep Abdussalam yang memuat tentang kedudukan dan keberadaan kiai sebagai pelopor masa depan umat yang ikut andil dalam politik praktis. Terjunnya kiai dalam dunia politik praktis diharapkan membawa implikasi terhadap situasi politik yang menggembirakan, keadaan demikian terjadi di dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada tahun 2006 di Kabupaten Tasikmalaya.⁸

Rini Pentania Arifa dalam skripsinya yang berjudul *“Peran Kiai Dalam Politik Di Kabupaten Sumenep Perspektif Fiqh Siyasah”* skripsi ini membahas tentang peranan-peranan kiai dalam politik di Kabupaten Sumenep yang tidak dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Sebagaimana kewajiban pemimpin dalam Islam harus memberikan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan mereka menjadi semacam rujukan (*central of reference*) mengenai bagaimana seharusnya umat berprilaku dan bersikap yang benar dalam kesehariannya para kiai politisi tidak dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat muslim di Sumenep.⁹

⁷ Ibnu Hajar, *Kiai Di Tengah Pusaran Pusaran Politik*, cet ke-1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2009).

⁸ Encep Abdussalam, *Peran Politik Kiai Studi Pilkada 2006 di Kabupaten Tasikmalaya, skripsi*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijag, 2007).

⁹Rini Pentania Arifa, *Peranan Kiai Dalam Politik Di Kabupaten Sumenep, skripsi*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: FakultasSyari’ah, UIN SunanKalijaga, 2005).

Pastinya masih banyak karya-karya tulis yang berkaitan dengan masalah di atas. Sementara itu, dari sekian banyak karya-karya tulis yang ada, penyusun belum menemukan satu karya pun yang khusus membahas tentang politik praktis KH. Zainuddin MZ. Inilah yang membedakan penelitian ini berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Oleh karenanya, penyusun merasa perlu dan penting untuk mengkaji secara spesifik hal ini.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Syar'i menurut pengertian ulama fikih ialah: titah Allah SWT yang mewujudkan suatu hukum, yakni yang dihadapkan pada mukallaf yang berhubungan dengan perbuatan mereka, atau kaidah yang dinashkan syara' mengenai suatu masalah.

Ajaran Islam tidak lepas dari politik. Selama sepuluh tahun terakhir dakwah nabi memimpin umat yang meletakkan nilai dan prinsip bernegara di dalam ajarannya. Beberapa hal yang termaktub di dalamnya, yaitu: 1. Negara (*state*) 2. Kekuasaan (*power*) 3. Pengambilan Keputusan (*decisionmaking*) 4. Kebijaksanaan (*Policy, Beleid*) dan 5. Pembagian (*Distribution* atau *Allocation*).

Berdasarkan kelima konsep pokok tersebut, selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat yang mungkin dalam hal ini akan diwakili melalui para tokoh ulama terkemuka dengan meletakkan *ijtihad* dan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat (*al-maslahah al-'ummah*).

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*siyasah ad-dunyah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maslahah al-‘ammah*), yang berkeadilan berdasarkan hukum etika sosial. Maka kemudian Islam secara eksplisit mengajarkan manusia menegakkan keadilan, kebebasan, dan toleransi, persamaan hak dan kewajiban serta bermusyawarah dalam kehidupan bersama.

Manusia sebagai representasi Tuhan di bumi memiliki dua fungsi, *pertama*, sebagai hamba-Nya yang taat. Hal ini termaktub dalam firman-Nya

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ¹⁰

Kedua, sebagai khalifah di dunia. Terhadap fungsi yang kedua, terdapat dua macam kekuasaan yang terkandung di dalamnya, yaitu kekuasaan yang bersifat umum dan kekuasaan yang bersifat khusus. Kekuasaan yang bersifat umum adalah kekuasaan untuk kemakmuran kehidupan di bumi, sedangkan kekuasaan yang bersifat khusus adalah kekuasaan dalam pemerintahan negara.¹¹ Manusia sebagai khalifah di bumi ini sebagaimana diterangkan Allah dalam firman-Nya

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ أَنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا اتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يَقْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ

الْدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ أَنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ¹²

¹⁰ Az-‘Zāriyāt (51): 56.

¹¹ Ahmad AzharBasyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, cet ke-1, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 15.

¹² Al-Baqarah (2): 30.

Menurut Imam Ghazali, tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin ia penuhi sendiri, tetapi lebih dari itu adalah untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti melalui pengamalan dan penghayatan ajaran agama secara betul, sedangkan yang demikian itu tidak mungkin tanpa keserasian kehidupan duniawi.¹³

Bertolak dari dasar pengertian itulah maka menurut Imam Ghazali kewajiban mengangkat seorang atau kepala pemimpin negara, tidak berdasarkan rasio, tetapi berdasarkan keharusan agama. Hal ini disebabkan karena persiapan untuk kesejahteraan *ukhrawi* harus dilakukan melalui pengamalan dan penghayatan ajaran agama secara betul.¹⁴

Hasbi Ash-Shidieq mengatakan bahwa tata aturan Islam tata aturan yang bersifat politik, jika tata aturan yang ditegakkan oleh Rasulullah di Madinah ditinjau dari segi ukuran-ukuran politik pada masa moderen, sedangkan bersifat keagamaan, jika dilihat kepada tujuan-tujuannya dan pergerakan-pergerakannya, hal ini disebabkan karena hakikat Islam adalah melengkapi segi-segi kebendaan (*madidiyah*) dan segi-segi kejiwaan (*ruhijiyyah*) dan itu berarti mencakup segala amal insan dalam kehidupan duniawinya dan *ukhrawinya*.¹⁵

¹³ Munawwir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 76.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 77.

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

Sementara itu, di kalangan pesantren selalu mengaitkan pengertian ‘*alim/ulama* dengan orang-orang yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW.

العلماء ورثة الأنبياء¹⁶

Sebagai *al-‘ulamā warāsat al-anbiyā*, ulama sebagai pewaris para Nabi. Hadits ini tampak relevan sebab semenjak Nabi Muhammad wafat, tak ada Nabi lagi setelah itu, dan ulama menjadi satu-satunya generasi yang melanjutkan tongkat estafet risalah penyebaran agama Islam dan menebar kedamaian bagi umat, karena itu secara historis dan sosiologis, ulama adalah mereka yang mumpuni dalam bidang ilmu agama. Kalaupun mahir dalam bidang-bidang lain, itu pun tidak dapat lepas sepenuhnya dari motif agama dan ketundukannya kepada Allah.¹⁷

Menurut Dawam Raharjo, ulama adalah pewaris Nabi SAW, tetapi yang diwariskan adalah misinya, yaitu Islam, termasuk di dalamnya adalah visi-misi al-Qur'an.¹⁸ Di Indonesia, kiai menjadi sosok yang dipandang sangat representatif sebagai ulama. Hal itu setidaknya didasarkan pada dua hal. *Pertama*, kiai adalah seorang yang mumpuni dalam ilmu agama. Kiai zaman dulu bahkan tidak hanya ahli di satu bidang ilmu agama, tetapi juga lihai dalam ilmu kemasyarakatan, perang, dan seni-sastra. Ilmu yang mumpuni itu menjadi bekal sekaligus ladang bagi kiai untuk mengayomi dan membimbing masyarakat.

¹⁶ At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), no. 2681.

¹⁷ Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Yogyakarta: Prenada Media, 2004), hlm.188.

¹⁸ Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an, (Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci)* (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 704.

Kedua, kiai selalu bertindak dan berbuat dilandaskan pada kasih sayang dan persaudaraan. Mustafa Bisri memaknai kiai dengan ”*al-ladžīna yandurūna ila al-‘ummah bi’aini al-rahmah*”, orang yang memandang masyarakat dengan kasih sayang.¹⁹ Sebagai seorang yang memiliki kedudukan sosial yang terhormat yang menjadikan panutan masyarakat, kiai dalam segala tindakannya hendaklah mementingkan kepentingan bersama (*maslahah al-‘ummah*), yang bergerak menuju istilah *hifzu al-‘ummah*.

Posisi kiai dalam masyarakat yaitu sebagai *sosial position*, merupakan unsur statis yang menunjuk terhadap suatu tempat individu dalam suatu organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukan terhadap fungsi, kedudukan dan tugas sebagai suatu proses dari peran itu sendiri. Selain kiai menduduki status yang tinggi karena religiusitasnya, ia juga dapat menjalankan peranan yang lain di luar bidang keagamaan seperti dalam bidang politik. Peran-peran itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat, maksudnya diharapkan dapat melakukan hal-hal tertentu sebagai kedudukan seseorang peran itu dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu:

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.

¹⁹ Ibnu Hajar, *Kiai Di Tengah Pusaran Politik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2009), hlm. 27.

2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.²⁰

Di kalangan umat Islam, terdapat perbedaan menarik, apakah kiai yang berfungsi sebagai pembimbing sepiritual agama diperbolehkan terjun dalam ranah politik sebagai pemimpin politik. Setidaknya ada tiga paradigma yang berkembang dalam pemikiran umat Islam terkait dengan antara hubungan agama dengan politik/negara. Tiga paradigma tersebut adalah, *pertama*, kelompok yang mengatakan bahwa antara agama dan politik/negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan bersifat formal.²¹ Pandangan ini banyak dianut oleh Syi'ah, gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan kelompok Wahabi di Saudi Arabia. Revolusi Iran yang dipimpin oleh Imam Khomaini sebagai bukti adanya pendapat pertama ini.²² Secara ekstrim, kelompok ini menyatakan bahwa sistem politik dalam agama Islam bukan saja ada, tetapi sudah menjadi *ma'lumun min ad-dīni bi ad-darūrah* (sesuatu yang sudah jelas diketahui wajibnya) seperti telah diketahui perintah wajib salat, zakat, puasa, haji, jihad, dan sebagainya.²³

²⁰ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 99-101.

²¹ Azyumardi Azra, *Pergolakan politik Islam*, hlm. 1

²² Muhammad Abid Al-jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'at*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001), hlm 19.

²³ Isma'il Yusanto, *Islam Ideologi, Refleksi Cendikiawan muda*, (Bangil Jawa Timur, 1998), hlm. 75.

Mempertanyakan apakah sistem politik Islam itu ada atau tidak, menurut kelompok ini, sama dengan mempertanyakan perlu tidaknya makanan bagi manusia yang sudah tersedot oleh banyak hal, terutama perang ideologi dan wacana dengan Barat. Mengingat urusan politik merupakan sesuatu yang sudah jelas perintah wajibnya, maka dari itu setiap umat Islam mempunyai kewajiban untuk menegakkan sistem politik Islam seperti yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dalam Negara Madinah.

Di kalangan pemikir politik Islam, teori hubungan antara agama dan negara yang bersifat formal (*legal formal*) ini dikemukakan antara lain oleh Abu Al-A'la Al maududi (1903-1979) pemimpin Jama'at Islami, Hasan Al-Banna (1906-1949), Sayyid Qutb (1906-1949) sebagai ideolog gerakan Ikhwanul Muslimin.²⁴ Selain tokoh-tokoh tersebut, juga terdapat nama-nama seperti al-Mawardi, Imam al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, Rasyid Ridlo, Jamaluddin Al-Afghani, Ibn Abi Rabi', dan Taqiyuddin An-Nabhani.²⁵

Paradigma *kedua* merupakan antitesis dari kelompok pertama yang disebut dengan kelompok skularistik. Kelompok ini memandang Islam tidak lebih dari agama-agama lain yang telah dapat memisah antara urusan agama dengan urusan negara. Umat Islam di negara-negara mayoritas muslim seharusnya meniru corak pemisahan antara agama dan negara yang terjadi di Barat. Menurut kelompok ini, Islam tidak terkait dengan urusan politik

²⁴ Telaah lebih detail tentang Ikhwanul Muslimin Lihat Ricard P. Mitchell, *The Sosirty Of Muslim Britthers*, (Oxford University Press, 1996) dan Husaini Ishak Musa, *The Muslim Britthers: The greatest Modern Islamic Movement*, (Beirut: Khajat's Book Coomperative, 1956).

²⁵ Isma'il Yusanto, *Islam Ideologi, Refleksi*, hlm. 75.

kenegaraan (*state political*). Lebih lanjut, pendapat ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik ini menolak pendasarannya negara pada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari suatu negara.²⁶ Salah satu tokoh Islam yang paling populer menyuarakan sekularisme adalah Ali Abdul Raziq dengan karya monumentalnya *al-islām wa uṣhūl al-ḥukm*. Ia adalah salah seorang Ulama' Mesir yang pernah diusir dari al-Azhar Mesir pada tahun 1925 karena pendapat dan karyanya yang menyuarakan sekularisme dalam Islam.²⁷

Paradigma *ketiga* memandang agama dan negara bergabung secara simbiotik, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Negara ditempatkan sebagai sarana penunjang perkembangan agama, dan agama diposisikan sebagai pembimbing etika dan moral (*moral force*) bagi suatu negara. Negara tidak perlu memiliki hukum Islam secara legal formal, tetapi agama hanya dijadikan pijakan nilai dalam menata kehidupan bangsa dan bernegara. Pandangan simbiosis agama dan negara ini dapat diketemukan dalam pikiran beberapa tokoh Islam, misalnya Thoha Hussain, Nur Kholis Madjid, dan Abdurahman Wahid.²⁸ Kelompok ketiga ini masih menganggap bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan paripurna yang mengatur seluruh

²⁶ M Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Orde baru*, (Jakarta Logos, 2001). Hlm. 49.

²⁷ Isma'il Yusanto, *Islam Ideologi, Refleksi.*, hlm. 75.

²⁸ Bernama lengkap Abu Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi Al-Bishri (354 H- 450H) termasuk salah satu pemikir Islam ternama dengan karya monumentalnya adalah al-Ahkam al-Shultaniyyah.

aspek kehidupan manusia dengan Tuhan-Nya. Kelompok ini masih mengakui bahwa dalam ajaran Islam terdapat nilai-nilai politik, tetapi hanya memberikan garis besar dan subtansinya saja, sedangkan rinciannya diserahkan kepada manusia sebagai *khilafah fi al-arḍi* sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada agar nilai-nilai sistem politik Islam tersebut tidak *out of date*.²⁹

Penganut sekulerisme berpandangan bahwa urusan politik/negara adalah urusan dunia sehingga tidak boleh dicampur-adukkan dengan urusan agama yang bersifat sakral-ilahiyah. Oleh sebab itu, kiai hanya mempunyai tugas sebagai pembimbing spiritual agama tanpa harus menjadi pemimpin politik. Peranan ini diperlakukan oleh para kiai pada masa orde baru, dimana kiai jarang sekali yang berkiprah dalam politik praktis sehingga benar-benar *concern* terhadap perjuangan cultural dalam membimbing umat.

Berangkat dari pemaparan tentang pengertian peran secara umum, dan sehubungan dengan kedudukannya dalam masyarakat, kiai merupakan sosok yang mempunyai beberapa peran yang melibatkan harapan-harapan perilaku yang saling bertentangan. Dalam suatu masyarakat, biasanya individu akan menjalankan perannya yang bersifat ganda. Kebanyakan individu dituntut untuk melakukan peran lebih dari satu yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan dan ketidak seriusan.³⁰

Membahas tentang “politik praktis kiai” seyogyanya mendasarkan pada konsep ruang (*space*) dan medan (*field*) terutama untuk mencermati seberapa jauh kiai memerankan ajaran agama yang diyakininya dalam perilaku sosial

²⁹Isma'il Yusanto, *Islam Ideologi, Refleksi.*, hlm. 76.

³⁰*Ibid*, hlm. 10

politik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Melihat fenomena yang berkembang paling tidak sejak dekade tahun 1980-an hingga tahun 2009-an, maka kontribusi dan bahkan partisipasi kiai tersebut ditempatkan dalam ruang sosial yang sedang berkembang di Indonesia menjadi relevan adanya dalam penelitian ini.

Kerangka seperti itu, persepsi teologis kiai diletakkan dalam dua ruang yang saling mempengaruhi: 1.) Ruang ekstern masyarakat Indonesia dan 2.) Ruang intern diri masing-masing individu, sedangkan fenomena politik nasional yang melingkupi kehidupan sosial kiai digunakan untuk menggambarkan medan sosial yang sedang berlangsung. Sehingga pada konteks demikianlah gerakan politik praktis kiai khususnya KH. Zainuddin MZ dapat dielaborasi serta dieksplorasi secara akademis pada bab-bab selanjutnya dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan di atas, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah studi perpustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan penelusuran dan penelaahan pada bahan tertulis. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data tertulis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada dua sumber data: sumber data primer dan sumber data sekunder.³¹ Sumber data primer adalah buku atau literatur yang menjadi rujukan utama dan dalam penelitian ini adalah karya-karya KH. Zainuddin MZ, seperti Dakwah & Politik dua diantaranya. Sumber data sekunder adalah karya-karya sarjana lain yang membahas tentang pemikiran politik praktis KH. Zainuddin MZ baik yang berupa buku, artikel, dan lain sebagainya.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Artinya mendeskripsikan pemikiran KH. Zainuddin MZ tentang hubungan agama dan negara, kemudian dianalisis untuk mengetahui karakteristik pemikirannya.

4. Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipakai dalam skripsi ini adalah pendekatan historis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan menelusuri sisi-sisi historis sebuah obyek penelitian mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan sebuah pemikiran serta konteks sosial politik yang memunculkan karakteristik dominan dari tokoh yang diteliti.³²

³¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

³² Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1998), hlm. 59.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipakai oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah deduktif,³³ yaitu analisis yang berangkat dari pemikiran politik Islam tentang hubungan agama dan politik praktis yang sifatnya umum dan kemudian digunakan untuk nilai partikularitas-partikularitas pemikiran KH. Zainuddin MZ tentang hubungan agama dan negara.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi mudah dicermati, maka diperlukan sistematika pembahasan yang jelas dan runtut. Berkaitan dengan hal ini penyusun merumuskan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab yang saling terkait.

Bab *pertama* pendahuluan yang berisi tentang selayang pandang mengenai penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri literatur-literatur yang dapat memastikan bahwa kajian ini menarik untuk diteliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan.

A. Bab *kedua* memuat peran Islam dan politik praktis kiai secara umum, dalam bab ini berisi tentang pengertian Islam, politik, dan kiai, konsep politik praktis serta menjelaskan peran kiai dalam masyarakat dan kontribusi kiai dalam bidang politik, dan Islam dan politik praktis.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 42

Bab *ketiga* berisi tentang politik praktis KH. Zainuddin MZ. Karena skripsi ini melihat peran KH. Zainuddin MZ dalam politik praktis persepektif siyasah, maka penyusun merasa perlu untuk memaparkan dan mengungkapkan tentang biografi KH. Zainuddin MZ, kiprah politik praktis KH. Zainuddin MZ dalam partai baik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atau Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Pemikiran Politik Praktis KH. Zainuddin MZ.

Bab *keempat* dibahas tentang analisis pemikiran politik KH. Zainuddin MZ persepektif siyasah. Pada bab ini yang akan di analisis adalah sikap KH. Zainuddin MZ dalam memposisikan diri dalam dakwah dan kampanye, pandangan KH. Zainuddin MZ terhadap pemilihan pemimpin dalam Partai Persatuan Pembangunan, dan tanggapan KH. Zainuddin MZ terhadap golongan putih (golput).

Bab *kelima* adalah penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa:

KH. Zainuddin MZ adalah seorang kiai yang ikut berpartisipasi dalam ranah politik, beliau memulai kiprah politiknya di PPP (Partai Persatuan Pembangunan) pada tahun 1977 dan pada tahun 2002 beliau bersama rekannya mendeklarasikan Partai Persatuan Pembangunan Reformasi (PPP Reformasi) yang kemudian berubah nama menjadi PBR (Partai Bintang Reformasi) pada tahun 2003 dan secara resmi ditetapkan sebagai calon presiden oleh partai ini, beliau menjabat sebagai ketua umum PBR sampai akhir tahun 2006 kemudian beliau mengakhiri karir perpolitikannya dan kembali fokus untuk berdakwah.

KH. Zainuddin MZ mempunyai pandangan bahwa selama beliau ikut partisipasi dalam ranah politik, sebagai seorang pedakwah ia harus bisa memposisikan dirinya antara dakwah dan kampanye, ketika ada pemilu beliau lebih mementingkan umat daripada kepentingan kelompok tertentu karena umat Islam tidak hanya berada di kelompok tertentu akan tetapi ada dimana-mana.

KH. Zainuddin MZ juga berpendapat tentang kepemimpinan (*leadership*) merupakan salah satu variable penting dalam kehidupan umat, bahkan menjadi faktor penentu (*determinant factor*) kemajuannya. Oleh karena

dalam sejarahnya PPP (Partai Persatuan Pembangunan) merupakan fusi dari berbagai partai Islam sebelumnya, KH. Zainuddin MZ mempunyai kriteria dalam menentukan pemimpin Partai tersebut. *Pertama*, ia komitmen keislamannya harus kental. *Kedua*, wawasan kebangsaannya harus luas. *Ketiga*, ia harus populis.

KH. Zainuddin MZ sendiri berpendapat mengenai golput (golongan putih), hal itu berkaitan dengan sikap politik seseorang walaupun golput menurut beliau adalah hak asasi yang harus dihormati. Namun, hak itu tidak boleh dikampanyekan kepada orang lain. Mengajak orang lain untuk bergolput, itu yang tidak benar karena orang melakukan sesuatu tentu ada motivasinya, bila dia tidak mendapat motivasi, tentu dia tidak akan melakukan pilihan.

B. Saran-Saran

Skripsi ini adalah salah satu dari sekian banyak karya tulis yang dibuat terkait dengan politik pemikiran KH. Zainuddin MZ. Kiprah beliau yang semula ,menjadi seorang da'i dengan sejuta umat, akhirnya berkarir di ranah politik. Satu hal yang perlu diingat bahwa dahulu beliau menyatakan tentang politik itu kotor, akan tetapi akhirnya beliau masuk juga di lingkungan yang disebutnya kotor itu. Dari penelitian yang penulis lakukan, ternyata beliau menggunakan cara agar bagaimana politik itu menjadi tidak kotor dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersih, yaitu sesuai dengan syariat Islam. Harapan saya agar ada penelitian yang lain terkait dengan politik KH. Zainuddin MZ yang bersih.

Bagi warga negara Indonesia yang baik, hendaklah menggunakan cara berpolitik yang bersih dan sehat. Bagi para pemilih hak suara hendaklah menggunakan hak suaranya dengan baik. Bagi yang tidak menggunakan hak pilihnya atau yang lebih dikenal sebagai golput sebaiknya jangan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti jejaknya, walaupun golput adalah sebagai hak asasi.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CC J-ART, 2004.

Raharjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an (Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Kunci)* Jakarta: Paramadina, 2002.

Shihab, M Qurais, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2006.

II. Kelompok Al-Hadis/Ilmu Hadis

At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'lul Marjan*, Semarang: Al-Ridha, 1993.

Bukhārī, Imam Al-, *Sahīh al- Bukhārī*, Kairo: Matba'ah al-Bahiyah al-Misriyah: 1937.

III. Kelompok Fiqh/ Hukum

Anam, Khoirul, *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer*, yogyakarta: Ide Pustaka, 2009.

Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011.

IV. Kelompok Siyasah/ Politik

Al-jabiri, Muhammad Abid, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'at*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001.

Ali, Fachry, *Dakwah Politik "Da'i Berjuta Umat"*, Bandung: Mizan, 1997.

Aziz, M. Imam, *Delima Para Pewaris Nabi dalam Greg Feal, Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LKIS, 2003.

Budiraharjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Granindo, 1993.

Hajar, Ibnu, *Kiai Di Tengah Pusaran Pusaran Politik*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2009.

Hakim, Ahmad Atho' Lukman, *Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia*, dimuat dalam Jurnal Isip Vol.2 N0.15, edisi Desember 2000-Januari 2001.

Kriswanto, Heri, *Gagalnya Peranan Politik Kiai Dalam Mengatasi Krisis Multi Dimensional*, Yogyakarta : pesantren Nawesae Press, 2008.

Majid, Nurcholis, "Cita-cita Politik Kita" dalam. Bosco Carvalo & Dasrizal (Penyuting), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, jakarta: LEPHENAS, 1983.

Mun'im, Abdul, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: LKIS, 1994.

MZ, Zainuddin, *Dakwah Dan Politik*, Bandung: Mizan, 1997.

Nashir, Haedar, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, yogyakarta: UMM Press, 2006.

Rapar, J.H, *Filsafat Politik Plato* Jakarta: Rajawali Press, 1981.

Ummatin, Khoiru, *Perilaku Politik Kiai*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.

Surbakti, Ramlan, *memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Granindo, 1992.

Syamsuddin, M Din, *Islam dan Politik Orde baru*, Jakarta Logos, 2001.

Syamsuddin, Din, *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam, Politik Demi Tuhan, Abu Zahro (red)*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.

Tahqiq, Nanang, *Politik Islam*, Yogyakarta: Prenada Media, 2004.

V. Kelompok Kamus

Partanto, Pius A. dan M. al-Barry, Dahlan, *Kamus Ilmiah Poluler* Surabaya: Arkola, 2001.

Poerwadarminto, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1981.

VI. Kelompok Website

<http://th1979.wordpress.com/2010/09/09/biografi-kh-zainuddin-mz/>

www.vivanews.com, diakses pada tanggal 5-juli-2011.

VII. Kelompok Surat Kabar

Suara Merdeka, diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2003.

Surya, diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2003.

Tempo, diterbitkan April 1990.

VIII. Kelompok Lain-lain

A. Dahl, Robert, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, terjemahan A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor, 1992.

A'la, Abdul, *Melampaui Dialog Agama*, Jakarta: Kompas, 2002.

Basyir,Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1993.

Berry, David, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1981.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Effendy , Bachtiar, “*Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*”, Jakarta: Paramadina, 1998.

Effendy, Bisri, *Annuqayah: Gerak Transformasi Sosial Di Madura*, Jakarta: P3M, 1990.

Giyanto, Arif dan Gunawan, Budi, *Bertaruh Citra Dakwah*, Solo: Era Intermedia, 2007.

Gibb, H. A. R., *whiter Islam?: A Survey Of Modern Movement In The Moslem World*, London: Victor Gollanez, 1932..

Hadi, Syamsul, *K.H Zainuddin MZ Figur Da'i Sejuta Umat*, Surabaya: Karunia, 1994.

Ma'arif, Ahmad Syfi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, disadur oleh Bisri Effendy, Jakarta: P3M, 1990.

Mortimer, Edaward, *Faith and Power; The Policies Of Islam*, New York: Rondon House, 1982

Sjadzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarahdan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Sutarto, Ayu, *Menjadi NU Menjadi Indonesia*, Surabaya : Khalista, 2008.

Yusanto, Isma'il, *Islam Ideologi, Refleksi Cendikiawan muda*, Bangil Jawa Timur, 1998.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	9	10	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
2	10	12	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
3	11	16	Para Ulama adalah pewaris para Nabi
BAB II			
4	52	35	Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
5	55	39	Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusi. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
6	55	40	Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan

BAB IV			
7	68	1	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
8	69	2	Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.
9	71	3	Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.
10	72	4	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
11	72	5	Hadits Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia akan diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.
12	74	6	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu) sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

13	74	7	Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).
14	76	8	“Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancuran. (Waktu itu) ada seorang sahabat yang bertanya, apa (indikasi) menyia-nyiakan amanah itu ya Rasul? Beliau menjawab: “Apabila suatu perkara diserahkan orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya”.
15	76	9	Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
16	81	10	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
17	82	11	Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Lampiran II

Biografi Ulama/Tokoh

Muhammad Hasbi ash-Shidieqy

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada 10 Maret 1904, sejak umur 8 tahun beliau adalah dsantri pindah dari pondok ke pondok lain yang berada di bekas pusat kerajaan pasai dan hanya satu setengah tahun berada di bangku sekolah al-Irsyad (1926 M), kemudian beliau diundang ke Lahore Pakistan (1958 M) untuk menyampaikan makalah berjudul *Internasional Islamic Colloquium*. Beliau adalah orang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1940 dan di pertegas lagi pada tahun 1960, menghimbau perluadanya fiqh berkepribadian Indonesia. Semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dalam bidang tafsir, hadist, fiqh dan ibadah umumnya. Dalam karir akademik beliau mendapat dua gelar Doktor Honoris Causa, karena jasanya mengembangkan pengetahuan perguruan tinggi dan pengetahuan keislaman di Indonesia, Gelar UNISBA pada tanggal 22 Maret 1975 dan IAIN Sunan Kalijaga tanggal 29 Oktober 1975. Beliau meninggal pada tahun 1983.

Imam Ghozali

Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 H (1058 M) di at-Taabiran/Ghazalah di bandar Tus, Khurasan (Iran), nama asli beliau adalah Abu Hamad Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad AlGhazali. Beliau bergelar "Al-Ghazali" bersempena dengan gelaran bapanya yang bekerja sebagai

pemintal bulu kambing (al-Ghazzal). Ada yang mengatakan mengambil dari kampung kelahirannya, Ghazalah. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir dan ahli falsafah Islam yang terkemuka hingga kini. Beliau meninggal dunia pada hari Senin 14 Jamadilakhir tahun 505 H (1111M) di Tus dan jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Kebanyakkan hasil-hasil karya Imam Al-Ghazali berbentuk falsafah, di antara hasil-hasil karya beliau yang lain termasuklah: Ihya Ulumiddin, Al-Munqiz Min ad-Dalal, Mizanul-amal, Tahafut al-Falasifah, Hidayah Al-Salikin, Jawahir Al-Quran, Minhaj al-Abidin, Asma Allah al-Husna, Ayyuha al-Walad, Kimia as-Sa'adah.